

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

I Gede Rizky Mahendra Putra¹
STIE YKPN Yogyakarta

Algifari^{2*}
STIE YKPN Yogyakarta

e-mail: fari.algi@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find empirical evidence of the impact of the General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditures (BM), and Gross Regional Domestic Product (GDP) on Original Revenue (PAD) in the province of Bali. This study uses data about PAD, DAU, BM, and PDRB 8 regencies and 1 city in the province of Bali in 2017-2021. The data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) report 2023. The research model used to test the research hypothesis is the panel data regression model. The best model found was the random effects model. The results of this study found that DAU has a negative effect on PAD, while BM and GRDP have a positive influence on district/city PAD in the province of Bali.

Keywords: *General Allocation Fund, Capital Expenditures, Gross Regional Domestic Product, Original Revenue (Pad), Panel Data Regression Model*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data PAD, DAU, BM, dan PDRB 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bali tahun 2017-2021. Data diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah model regresi data panel. Model terbaik yang ditemukan adalah model efek acak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap PAD, sedangkan BM dan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD kabupaten/kota di provinsi Bali.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Model Regresi Data Panel.

JEL: H30, O23

Diterima	: 06 Oktober 2023
Ditinjau	: 10 Oktober 2023
Dipublikasikan	: 30 November 2023

1. PENDAHULUAN

Setiap wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi pemerintahan yang ada di setiap daerah. Sistem Otonomi daerah menyebabkan setiap daerah dengan leluasa mengatur dan mengembangkan daerahnya dalam usaha mempercepat pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di seluruh wilayah.

Kebijakan ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang bertujuan untuk mengatur keuangan daerah. Selain itu, berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengubah mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat harus mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif untuk memberikan pelayanan dan pembangunan tanpa biaya yang cukup. Untuk memastikan kebebasan regional, pemerintah pusat harus mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. (Hamsia, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengukur dana daerah dan sering dikaitkan dengan keberhasilan otonomi daerah. Donor PAD sebagian besar ialah pajak dan retribusi daerah. Daerah membelanjakan PAD. Dengan demikian, jika PAD meningkat, maka pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak dana untuk pembiayaan daerah, dan otonomi daerah akan meningkat. PAD merupakan sumber pendanaan untuk belanja dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila PAD sebagai tolok ukur otonomi daerah (Harliza dan Anitasari, 2017).

Desentralisasi mengubah tata cara penyaluran dana antara pusat dan daerah, sehingga mengubah perimbangan keuangan daerah-pusat. (Hananto, 2018). Untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur daerah, pemerintah pusat menerbitkan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan dalih dana perimbangan. DAU merupakan dana asal APBN yang dibentuk untuk pemerataan keuangan daerah. Dana Alokasi Umum ini akan menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja daerah.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa literatur menjelaskan banyak faktor yang dapat mempengaruhi PAD. Penelitian ini hanya membatasi 3 faktor yang mempengaruhi PAD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dioungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti yang diatur dalam peraturan daerah dan perundang undangan untuk membiayai kegiatan daerah tersebut. Selain itu PAD juga mencakup sumber

pendapatan lainnya yang sah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah. DAU bagian dari belanja dalam APBN dan komponen pendapatan dalam APBD. APBN membutuhkan setidaknya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto untuk dana ini untuk daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia. Provinsi dan kabupaten/kota membagi DAU berdasarkan penguasaannya terhadap urusan pemerintahan. Jika tidak bisa dihitung secara numerik, daerah dan kabupaten/kota membagi DAU antara 10% sampai 90%

Formula yang memuat dua variabel, yaitu defisit fiskal dan alokasi fundamental, digunakan untuk menentukan alokasi DAU suatu daerah. Kesenjangan fiskal suatu daerah ialah perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskalnya. Beberapa faktor, termasuk populasi, luas, indeks biaya konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia, diperhitungkan saat menentukan kebutuhan fiskal suatu negara. Sedangkan kapasitas fiskal ditentukan dengan menggunakan PAD dan Dana Bagi Hasil. Alokasi Pokok dihitung atas dasar seluruh gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan menggunakan formula ini, maka DAU dapat dihitung untuk tiap daerah secara proporsional berdasarkan faktor faktor yang terkait dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

2.3 Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk membeli/pengadaan, atau membangun aset tetap berwujud yang nilainya dapat dimanfaatkan lebih dari satu tahun dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan sebagai belanja modal memiliki kriteria bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya tambahan aset baik dalam bentuk aset tetap maupun lainnya, jumlah pengeluaran tersebut melebihi ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait kapitalis aset tetap maupun aset lainnya, dan aset yang diperoleh melalui pengeluaran tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual kembali (Wahyuni, 2019). Dalam neraca Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pos Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang membantu beberapa tahun fiskal, meningkatkan aset atau kekayaan daerah, dan meningkatkan pengeluaran rutin layaknya biaya pemeliharaan dalam pengeluaran manajemen umum. Belanja modal memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah terkait sarana dan prasarana fasilitas publik serta menjaga kelancaran kepentingan daerah. (Nopitasari, 2017).

Pemberian bantuan berupa dana transfer atau perimbangan dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyebabkan kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih banyak mengalokasikan belanja menggunakan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum daripada menggunakan PAD yang berasal dari sumber pemasukan lokal (Salawali *et al.*, 2019).

2.4 Produksi Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto disingkat PDRB menggambarkan nilai tambah produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Menurut Setianingsih (2017) perhitungan Produk Domestik Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan menggunakan beberapa pendekatan harga

diantaranya yaitu Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. Cara perhitungan dari beberapa pendekatan berbeda, untuk menghitung harga berlaku, nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut, sementara untuk menghitung harga konstan, nilai barang dan jasa dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Tahun dasar dijadikan acuan dalam perhitungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah nilai output yang dihasilkan oleh suatu sektor atau lapangan usaha di suatu wilayah tanpa membedakan faktor produksi. PDRB ialah salah satu statistik pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi dalam keuangan daerah karena hal ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rahman dan Chamellia (2015) bahwa PDRB dapat menunjukkan seberapa baik suatu daerah mengelola dan menggunakan sumber dayanya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dana alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk bantuan dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam bidang pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan DAU dan PAD sebagai sumber pendapatan untuk belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Meskipun studi mengenai dampak dana perimbangan terhadap pendapatan daerah telah sering dilaksanakan, penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PAD belum banyak ditemukan.

Peneliti lain sebelumnya telah meneliti pengaruh DAU terhadap PAD. Namun, penyelidikan menghasilkan hasil yang bertentangan. Penelitian Maulana dan Algifari (2021) menemukan bukti empiris bahwa DAU tidak berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan hasil penelitian Frelistiyani (2011) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PAD. Penelitian ini merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Mohammed *et al* (2015) dan Dewi dan Budi (2015) menyatakan jika pengeluaran modal merupakan satu dari berbagai jenis pengeluaran pemerintah daerah yang mampu menambah jumlah asset tetap dan menghasilkan keuntungan dalam jangka Panjang. Salah satu contoh pengeluaran modal adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi fasilitas umum, dimana diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pertumbuhan daerah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Darwanis dan Saputra (2014) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Artinya, semakin besar belanja modal berdampak pada meningkatnya PAD. Hasil penelitian Hikmahyanti dan Soelistyo (2021) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data tahun 2014-2018 menimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merumuskan hipotesis ke dua adalah sebagai berikut:

H2: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Semakin tinggi PDRB semakin tinggi juga kinerja perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah yang baik memungkinkan daerah mengoptimalkan penerimaan daerah

yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD. Hasil penelitian Devi (2019), Nuriman (2018), Hikmahyanti dan Soelistyo (2021), Maulana dan Algifari (2021) menimpulkan bahwa Produksi Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merumuskan hipotesis ke tiga adalah sebagai berikut: H3: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini data sekunder berupa data Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017-2021 yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2023. Populasi pada studi ini ialah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebanyak 9 Kabupaten/Kota, yang mencakup sebanyak 8 Kabupaten dan 1 Kota. Sedangkan cakupan sampel pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2017-2021 dengan cakupan sebanyak 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Peneliti ini menggunakan regresi data panel untuk menguji hipotesis penelitian dikembangkan. Metode analisis ini menggabungkan data *cross-sectional* terdiri dari 9 kabupaten/kota di provisi Bali dan *time series* 5 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Model regresi yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian ini adalah model regresi data panel sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum (Rupiah)

BM_{it} = Belanja Modal (Rupiah)

PDRB_{it} = Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)

β_0 = Konstanta

i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

ε_{it} = *error terms*

Data penelitian diolah menggunakan program aplikasi statistic E-Views. Model regresi data panel akan menghasilkan 3 model regresi estimasi, yaitu model *common effects* (CE), model *fixed effects* (FE), dan model *random effects* (RE). Pemilihan model estimasi terbaik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian di antara ketiga persamaan tersebut menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji BP LM. (Algifari, 2021).

Model yang terbaik di antara ketiga model estimasi yang dihasilkan akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (DAU, BM, PDRB) terhadap variabel dependen (PAD). Uji F digunakan untuk menguji kemampuan semua variabel independen (DAU, BM, PDRB) menjelaskan variabel dependen (PAD). Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan semua variabel independen (DAU, BM, PDRB) menjelaskan variabel dependen (PAD).

Penggunaan data panel pada model regresi dapat mengeliminir masalah multikolinearitas dalam model regresi, sehingga pada penelitian ini tidak dilakukan uji multikolinearitas. Data panel pada model regresi cenderung bersifat data *cross section*, sehingga tidak dilakukan uji autokorelasi. Data penelitian ini ditransformasi ke dalam bentuk logaritma untuk menghindari terjadinya heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Jarque-Berra. Semua

pengujian statistik dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis data panel regresi penelitian ini terdapat tiga model estimasi, yaitu model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*. Pengujian statistik dilakukan untuk menentukan model mana yang tepat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Data yang diolah pada penelitian ini adalah data lama bentuk logaritma (model logaritma), karena pada model biasa terdapat masalah heteroskedastisitas.

Model regresi data panel menghasilkan 3 model regresi estimasi. Pemilihan model terbaik di antara ketiga model tersebut untuk menguji hipotesis penelitian dimulai melakukan uji Chow. Uji Chow untuk mengetahui model yang terbaik di antara model *common effects* dan model *fixed effects*. Hipotesis nol uji Chow menyatakan bahwa model regresi estimasi yang tepat adalah yang memiliki konstanta berbeda. Dengan demikian model *fixed effects* lebih tepat dibandingkan dengan model *common effects*. Tabel 1 berikut ini menyajikan nilai statistik uji Chow.

Tabel 1
Nilai Statistik Uji Chow

Test	Statistic	d.f	Prob	Keputusan
Cross-section F	10,638683	8;33	0,0000	Menolak H0
Cross-section Chi-square	57,379692	8	0,0000	

Sumber: data diolah, 2023.

Tabel 1 menunjukkan nilai F statistik sebesar 10,638683 dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0000. Nilai probabilitas F statistik adalah 0,0000 kurang dari 0,05 menunjukkan uji Chow menolak hipotesis nol. Dengan demikian dalam menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali lebih tepat model *fixed effects* dibandingkan dengan model *common effect*.

Model estimasi yang baik untuk menguji hipotesis penelitian adalah model estimasi yang memiliki sifat konsisten dan efisien. Model *fixed effects* bersifat konsisten, namun cenderung tidak efisien. Oleh karena itu model *fixed effects* perlu dibandingkan dengan model *random effects* yang bersifat efisien, namun cenderung tidak konsisten. Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui model yang tepat di antara model *fixed effects* dan model *random effects*. Hipotesis nol uji Hausman menyatakan model *random effects* bersifat konsisten. Tabel 2 berikut ini menyajikan nilai statistik uji Hausman.

Tabel 2
Nilai Statistik Uji Hausman

Test	Chi-Sq. Stat.	d.f	Prob	Keputusan
Cross-section random	5,923367	3	0,1154	Menerima H0

Sumber: data diolah, 2023.

Tabel 2 menunjukkan nilai statistik Chi-Square adalah 5,923367 dan nilai probabilitas Chi-Square statistik adalah 0,1154. Nilai probabilitas sebesar 0,1154, lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa keputusan uji Hausman adalah menerima H0 yang artinya model *random effects* lebih tepat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian daripada model *fixed effects*.

Hasil uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model estimasi terbaik untuk menguji

hipotesis penelitian adalah model random effects dibandingkan dengan model *common effects* dan model *fixed effects*. Hasil pengujian tersebut menunjukkan model *random effects* memiliki sifat efisien dan konsisten. Tabel 3 berikut ini menyajikan nilai statisti model *random effects*.

Tabel 3
Nilai Statistik Model Random Effects

Variable	Koefisien	Std. Error	t- statistik	Prob
C	7,249766	7,305033	0,992434	0,3268
LOG(DAU)	-0,971024	0,327455	-2,965368	0,0050
LOG(BM)	0,150354	0,062300	2,413388	0,0204
LOG(PDRB)	1,234064	0,148763	8,295484	0,0000

Sumber: data diolah, 2023.

Identifikasi terhadap normalitas residual model *random effects* tersebut menggunakan uji Jarque-Bera. Hipotesis nol uji Jarque-Bera menyatakan bahwa residual model regresi estimasi berdistribusi normal. Tabel 4 berikut ini menyajikan nilai statistik uji Jarque-Bera.

Tabel 4
Hasil Statistik Uji Jarque-Bera

Test	JB Stat.	Prob JB Stat.	Keputusan
Jarque-Bera	0,788861	0,674064	Menerima H0

Sumber: data diolah, 2023.

Tabel 4 menunjukkan besarnya nilai probabilitas signifikansi Jarque-Bera adalah 0,674064 lebih dari 0,05. Keputusan pada uji Jarque-Bera adalah menerima H0. Kesimpulan dari uji Jarque-Bera adalah model regresi estimasi memiliki residual yang berdistribusi normal.

Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap kemampuan semua variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen melalui uji F, mengukur kemampuan semua variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dengan nilai koefisien determinasi (R^2), dan pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan uji t menggunakan nilai statistik yang diperoleh dari model *random effects*.

Hipotesis nol (H_0) pada uji F menyatakan bahwa semua variabel independen (DAU, BM, PDRB) tidak mampu menjelaskan variasi variabel dependen (PAD). Tabel 5 berikut ini menyajikan nilai statistik uji F.

Tabel 5
R-Square dan Nilai Statistik Uji F Model Random Effects

R-Square	F-Stat.	Prob F-Stat.	(N1, N2)	Keputusan
0,680721	29,13810	0,0000	(3,41)	Menolak H0

Sumber: data diolah, 2023.

Pada Tabel 5 terlihat nilai F hitung statistik sebesar 29,13810 dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000. Nilai probabilitas F statistik adalah 0,0000 kurang dari 0,05 menunjukkan keputusan pada uji F adalah menolak hipotesis nol (H_0). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Koefisien determinasi (R^2) model random effects disajikan pada Tabel 5. Koefisien determinasi ini merupakan ukuran kemampuan PAD, BM, dan PDRB menjelaskan variasi PAD. Nilai R^2 model random effects adalah sebesar 0,680721 menunjukkan bahwa Dana

Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 68,07%. Sisanya sebesar 0.3192 atau 31,92% PAD dijelaskan oleh variabel lain selain DAU, BM, dan PDRB. Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini menggunakan uji t pada model random effects. Tabel 6 berikut ini menyajikan nilai statistik uji t.

Tabel 6
Nilai Statistik Uji t

Variabel	Koefisien	SE	t- stat.	Prob.	Keputusan
C	7,2498	7,3050	0,9924	0,3268	
LOG(DAU)	-0,9710	0,3275	-2,9654	0,0050	Menerima H0
LOG(BM)	0,1503	0,0623	2,4134	0,0204	Menolak H0
LOG(PDRB)	1,2341	0,1488	8,2955	0,0000	Menolak H0

Sumber: data diolah, 2023.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tabel 6 terlihat koefisien regresi untuk variabel DAU adalah -0,971024 bertanda negatif, sehingga keputusan pada pengujian ini adalah menerima hipotesis nol (H0) yang artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hipotesis pertama tidak terbukti.

Hipotesis ke dua (H2) menyatakan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja Modal (BM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,150354 dan nilai t statistiknya adalah 2,413388 dengan probabilitas t statistik sebesar 0,0204. Nilai probabilitas t statistik adalah 0,0204 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H0). Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hipotesis ke dua penelitian ini terbukti.

Hipotesis ke tiga (H3) menyatakan bahwa Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki koefisien regresi sebesar 1,234064 dan dari hasil pengujian diperoleh nilai t statistik sebesar 8,295484 yang lebih besar dari nilai t tabel 2,019541. Selain itu, nilai probabilitas t statistiknya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari nilai taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hipotesis ke tiga terbukti.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian t, dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan secara kesimpulan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Bali. Artinya, kenaikan DAU akan menyebabkan PAD turun. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Algifari *et. al.* (2021) menggunakan data 33 provinsi di Indonesia menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi

Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian Maulana dan Algifari (2021) menggunakan data di provinsi Kalimantan Selatan berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan.

Pengaruh negatif DAU terhadap PAD di provinsi Bali kemungkinan disebabkan oleh DAU yang diterima di Kabupaten/Kota Provinsi Bali digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa contoh penggunaan DAU Provinsi Bali seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pariwisata, karena pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Bali, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah Namun, penggunaan DAU Provinsi Bali harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan tentang penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali harus memastikan bahwa penggunaan DAU dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tepat sasaran dan efektif.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antardaerah. Meskipun demikian, DAU dapat berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika tidak dikelola dengan baik. Berikut beberapa kemungkinan penyebab DAU dapat berpengaruh negatif terhadap PAD di Kabupaten/kota Provinsi Bali. (1) Pengelolaan anggaran yang buruk. Ketika DAU diterima oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan anggaran yang buruk dapat mengakibatkan kebocoran anggaran dan penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien.

Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya penghasilan PAD karena anggaran tidak digunakan dengan baik. (2) Kurangnya Inovasi. Ketergantungan pada DAU juga dapat membuat Pemerintah Daerah kurang inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru. Jika Pemerintah Daerah tidak mampu mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru, maka PAD tidak akan meningkat, meskipun DAU terus diberikan. (3) Kurangnya control. Pemerintah Pusat mungkin tidak memiliki kontrol yang cukup baik terhadap penggunaan DAU oleh Pemerintah Daerah. Ini dapat menyebabkan DAU digunakan secara tidak efektif dan efisien, sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup pada PAD.

Uraian di atas menjelaskan bahwa DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat berpengaruh negatif pada PAD jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki strategi yang tepat dalam mengelola DAU agar dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini memperoleh bukti empiris Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Bali. Artinya, kenaikan Belanja Modal akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah di provinsi Bali. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Algifari (2021) menggunakan data di provinsi Kalimantan Selatan menghasilkan kesimpulan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti gedung, jalan, jembatan, sarana air minum, dan sebagainya. Belanja Modal yang meningkat dapat memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah. Berikut adalah beberapa dampak positif dari meningkatnya Belanja Modal terhadap PAD. (1) Meningkatkan investasi. Dengan meningkatkan belanja modal, pemerintah daerah

dapat membangun infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang dibutuhkan oleh investor.

Hal ini akan meningkatkan investasi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD daerah. (2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing. Meningkatnya belanja modal dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, yang akan meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah tersebut. Hal ini akan memperkuat sektor-sektor ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD daerah. (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dikeluarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi seperti industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata, dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ekonomi ini akan meningkatkan produksi dan penghasilan di daerah, sehingga PAD daerah juga akan meningkat. (4) Meningkatkan kualitas layanan publik. Belanja modal juga dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan air minum dan sanitasi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan PAD daerah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa belanja modal yang tidak terencana dengan baik atau tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan pengeluaran yang tidak efektif dan dapat menimbulkan kerugian bagi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan belanja modal untuk mendukung peningkatan PAD.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kesimpulan dari hasil pengujian statistik penelitian ini menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Bali. Artinya, kenaikan PDRB kabupaten/kota di provinsi Bali akan berdampak pada kenaikan PAD kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Devi (2019), Nuriman (2018), Hikmahyanti dan Soelistyo (2021), dan Maulana dan Maulana dan Algifari (2021) yang menyimpulkan bahwa Produksi Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam penelitian ini di Kabupaten/Kota Provinsi Bali akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan pula. Hal tersebut dapat terjadi karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keduanya yang dapat dijadikan sebuah Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi situasi keuangan dan otonomi keuangan suatu daerah.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi hubungan antara PDRB dan PAD di sebuah wilayah, seperti (1) Tingkat pertumbuhan PDRB dapat mempengaruhi PAD karena semakin tinggi PDRB, semakin banyak pajak yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pertumbuhan PDRB, semakin besar kemungkinan PAD akan meningkat. (2) Komposisi sektor ekonomi di daerah juga dapat memengaruhi PAD. Beberapa sektor seperti sektor jasa biasanya menghasilkan lebih banyak PAD daripada sektor lain seperti sektor pertanian. Jadi, jika daerah memiliki sektor-sektor yang menghasilkan PAD yang lebih besar, maka PAD juga akan lebih besar. (3) Tingkat pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga memengaruhi PAD. Semakin tinggi tingkat pajak, semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian semakin tinggi PDRB di sebuah daerah, semakin besar kemungkinan PAD akan meningkat, terutama jika daerah tersebut memiliki sektor-sektor yang menghasilkan PAD yang besar dan pemerintah daerah menerapkan pajak yang cukup tinggi. Meskipun demikian, hubungan antara PDRB dan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang disebutkan sebelumnya karena masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan tersebut.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan DAU akan berdampak pada penurunan PAD.

Hal tersebut terjadi karena penggunaan DAU di Kabupaten/Kota Provinsi Bali digunakan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan sektor pariwisata di Bali namun pengelolaan anggaran yang buruk dari pemerintah daerah, kurangnya inovasi dan kurangnya kontrol dari pemerintah pusat. Ini dapat menyebabkan DAU digunakan secara tidak efektif dan efisien, sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup pada PAD.

Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Oleh karena itu, setiap peningkatan dalam Belanja Modal akan menyebabkan kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah akan memberikan dampak seperti meningkatnya investasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Oleh karena itu, kenaikan dalam Produk Domestik Regional Bruto akan mengakibatkan peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat terjadi karena kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemandirian dan kesehatan keuangan suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan EViews 11*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Algifari, A., Nurkhin, A., & Saputro, I. H. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Transfer untuk Kemandirian Pembiayaan Daerah di Indonesia Menggunakan Model Struktural Partial Least Square. *Business and Accounting*. Vol. 2 No. 1. pp. 10–21.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 1 No. 2: pp. 183–199.
- Devi, N. A. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Kediri. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Dewi, N. W. N., dan M. K. S. Budhi. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4 (11): pp. 1391-1420.
- Hamsiah, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Azkiya Publishing. Bogor.
- Hananto, F. D. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Harliza, T., & Anitasari, M. (2017). Analisis Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 5 No. 2: p.p. 133–140.
- Hikmahyanti, Nuri dan Soelistyo, Aris (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. Vol. 5 No. 4: pp. 665-677.
- Frelistiyani, W. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa pada Tahun 2006-2008). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maulana, M. H dan Algifari (2021). Dampak Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *SPREAD*. Vol. 10 No. 2: pp. 18-2.
- Nopitasari, E. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015). *Jurnal Akuntansi Syariah IAIN Surakarta*: pp. 1–80.
- Nuriman, L. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten. *Skripsi*. UIN. Banten.
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*. Vol. 8 No. 1: pp. 88–99.
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. H. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol 18 No. 2: pp. 20-39.
- Wahyuni, A. S. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasan Anggaran Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. *Skripsi*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.